

PEMBERITAAN MEDIA



LULUK'S UPDATE

EDISI
4-10 November 2019

*MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN
BERSAMA LULUK ULİYAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI*



PERUBAHAN IKLIM

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara:

- Berharap BPDLH dapat mengurangi dampak perubahan iklim
- Perlu sinergi Kementerian RSDM dalam mengelola BPDLH agar hasilnya dapat dikontribusikan untuk energi terbarukan
- Berharap BPDLH menjadi focal point dalam perdagangan karbon.
- Sinergi antar kementerian atau lembaga dan pihak swasta akan mempecepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi dampak perubahan iklim di Indonesia.

KLHK-FAO Jajaki Kerja Sama Pengendalian Perubahan Iklim

- KLHK menjajaki kerjasama dengan FAO untuk memperkuat pengendalian perubahan iklim, khususnya di sektor kehutanan dan lahan
- Kerjasama baru antara FAO dengan KLHK itu berjudul *Strengthening Indonesian Forest and Land Monitoring for Climate Actions*.
- Rancangan kerja sama proyek bertujuan untuk memungkinkan Indonesia meningkatkan pengelolaan hutan dan lahan serta mengkatalisasi aksi mitigasi perubahan iklim.
- Kerja sama baru ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas teknis dan koordinasi kelembagaan untuk National Forest Inventory (NFI) dan National Forest Monitoring System (NFMS).

KLHK-FAO Jajaki Kerja Sama Pengendalian Perubahan Iklim

- Sebelumnya KLHK dan FAO telah melakukan kerjasama, yakni peningkatan tata kelola hutan dan implementasi legalitas kayu dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
- Juga kerjasama tentang Invasive Alien Plant Species (IAPS) yang akan dilaksanakan, dimana Indonesia harus mengamankan keanekaragaman hayati yang ada di kawasan konservasi.
- FAO juga telah mendukung penyusunan buku State of Indonesia's Forest (SoIFo) yang memuat langkah-langkah korektif mendasar dan besar-besaran Pemerintah Indonesia dalam sektor kehutanan.
- Tentang rencana kajian penyebab kebakaran dan bagaimana menyelesaikannya, KLHK akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, karena sebagian besar kebakaran lahan pada 2019 merupakan penyiapan kegiatan pertanian atau perkebunan sehingga harus menerapkan penyiapan lahan tanpa bakar.

Paris Agreement

- Selama dua tahun terakhir Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan ingin menarik negaranya dari Perjanjian Iklim Paris.
- Namun, proses untuk mengeluarkan AS dari perjanjian tersebut butuh waktu satu tahun. Maka, AS tidak dapat keluar sampai pemilihan presiden tahun 2020.
- Perjanjian Paris yang ditandatangani hampir 200 negara tersebut bertujuan untuk mengurangi atau mengendalikan polusi yang mengendap di atmosfer. Negosiasi perjanjian iklim yang dilakukan pada 2015 itu didorong oleh AS dan China.
- Perjanjian tersebut mulai berlaku pada 4 November 2016. Salah satu ketentuan dalam perjanjian tersebut mengatakan tidak ada negara yang dapat menarik diri dalam tiga tahun pertama.
- Maka pada pekan ini, AS baru dapat memulai proses penarikan diri. Prosesnya dimulai dengan mengirimkan surat ke PBB. AS belum resmi keluar satu tahun setelah itu. Artinya satu hari setelah pemilihan presiden tahun depan.
- Setelah keluar, AS akan menjadi satu-satunya negara yang tidak terikat oleh Perjanjian Paris.

Paris Agreement

- Mantan negosiator iklim pemerintahan Barack Obama, Andrew Light : jika pada 2020 mendatang Trump kalah maka presiden baru dapat masuk kembali ke perjanjian iklim dalam waktu 30 hari. Penarikan AS dari perjanjian itu akan merusak upaya mengatasi pemanasan global.
- Sebuah laporan yang dirilis tahun ini oleh jaksa agung negara bagian menyebutkan bahwa kemunduran-kemunduran kebijakan emisi AS dapat meningkatkan emisi karbon AS lebih dari 200 juta ton per tahun pada 2025.
- Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengonfirmasi langkah AS tersebut dan menegaskan Washington telah mengalami penurunan gas emisi selama beberapa tahun terakhir.
- AS telah mengurangi semua emisi, memperkuat ketahanan, menumbuhkan ekonomi, dan menjamin ketersediaan energi untuk warga negaranya
- Kesepakatan Paris dianggap tidak adil bagi ekonomi AS. AS akan mengikuti model yang pragmatis dan realistis dengan menggunakan sumber energi dan teknologi bersih dan efisien

Paris Agreement

- Kepala pusat hukum perubahan iklim Columbia Law School Michael Gerrard menyanggah klaim Pempo.
- Alasan penurunan emisi jangka panjang adalah karena AS menggunakan lebih sedikit batubara dan memperketat standar kualitas udara.
- Sementara Trump saat ini justru mendorong lebih banyak batubara dan melonggarkan standar itu.

Paris Agreement

- Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova menyesalkan mundurnya AS dari Kesepakatan Paris
- Penolakan AS yang menyumbang sekitar 15% dari emisi gas rumah kaca global dapat membatasi potensi upaya internasional bersama untuk mengurangi dampak antropogenik pada sistem iklim planet

PEMBANGUNAN RENDAH KARBON

Pembangunan Rendah Karbon

Medrilzam, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas

- Dalam waktu dekat program-program terkait isu perubahan iklim akan dikemas dalam pembangunan rendah karbon. Ia perpaduan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan hidup. Pemerintah serius mengarusutamakan pembangunan rendah karbon.
- Data Bappenas, Indonesia berhasil menurunkan angka intensitas emisi nasional (emisi gas rumah kaca/GRK, per satuan output ekonomi) dari 681,16 ton CO₂ ekuivalen permiliar rupiah pada 2010, jadi 512,08 ton CO₂ ekuivalen permiliar rupiah pada 2016.
- Kementerian Keuangan memperkirakan tanpa intervensi green policy pertumbuhan ekonomi turun jadi 4% dari target 5-6%.
- Bukti keseriusan implementasi konsep pembangunan rendah karbon dengan memasukkan program itu dalam rencana program jangka menengah nasional lima tahun ke depan.

Pembangunan Rendah Karbon di Papua Barat

Medrilzam, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas:

- Pembangunan rendah karbon harus dikaitkan dengan kajian lingkungan hidup strategis yang dampak konkritnya ke masyarakat. Selama ini di daerah pemahaman pembangunan hanya untuk memenuhi target penurunan emisi, tanpa memperhatikan pembangunan ekonomi dan isu lingkungan.
- Melalui pembangunan rendah karbon, dapat diintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam pembangunan melalui perencanaan pembangunan, dan sekaligus menjalankan prinsip-prinsip SDG dan Paris Agreement.
- Pembangunan Rendah Karbon membangun dengan prinsip rendah karbon, melakukan konservasi dari sumber daya alam dan sekaligus menghindari eksploitasi besar-besaran dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, mengawinkan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.
- Saat ini banyak sekali Rencana aksi daerah untuk pembangunan. Bappenas bekerja sama dengan Kemendagri, khusus untuk di daerah mengkompilasi semua rencana aksi daerah yang ada untuk bahan masukan utama dalam penyusunan kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RPJMD.
- Ada 5 aspek dalam melakukan rencana *sites/evidence based policy*. Diantaranya, keikutsertaan *carrying capacity* sebagai komponen penting dalam penyusunan perencanaan dan target nasional. Kemudian analisis *trade off* untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial, implementasi prinsip holistik, integrated tematik dan spasial, serta inklusifitas dalam penyusunan perencanaan dengan stakeholder terkait

Pembangunan Rendah Karbon di Papua Barat

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Nixon Saiba:

- pemerintah Provinsi Papua Barat siap mengimplementasikan pembangunan rendah karbon dengan salah satunya menerapkan program investasi hijau yang tengah dijalankan dan mendorong pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- Tantangan pelaksanaan program pembangunan rendah karbon termasuk pemahaman dan pengetahuan, kurangnya data pendukung, sinkronisasi berbagai inisiatif dan perlu adanya landasan hukum dan dukungan berbagai pihak

Bupati Tambrau Gabriel Assem:

- Kabupaten Tambrau saat ini sudah menjadi kabupaten konservasi.
- Kabupaten Tambrau sangat memperhatikan program pembangunan rendah karbon karena sebagai Kabupaten konservasi di Papua Barat, prinsip-prinsipnya sejalan dengan yang direncanakan di Kabupaten Tambrau.
- Tambrau akan memajukan program jasa lingkungan dengan mendorong pendapatan masyarakat dari sektor ekonomi serta ekowisata

SAWIT

Sikap lembaga pendanaan Eropa terhadap sawit berkelanjutan

- Tuntutan global agar sektor pendanaan ikut bertanggung jawab memastikan industri sawit yang menggunakan dananya menjalankan praktik berkelanjutan semakin kuat.
- Poin kelima Kesepakatan Iklim Paris menekankan pentingnya pendanaan bagi negara-negara berkembang untuk membangun ekonomi hijau.
- Perbankan menyediakan pendanaan cukup besar bagi industri sawit global, termasuk yang beroperasi di Indonesia.
- Peran lembaga pendanaan di Uni Eropa sangat besar dan ada tanda-tanda positif mereka mengambil langkah meninggalkan pendanaan untuk energi fosil.
- Tekanannya sangat kuat mempertanyakan apa sumbangan sektor pendanaan Eropa terhadap keanekaragaman hayati
- ABM-AMRO dan Rabobank dari Belanda termasuk di antara banyak perbankan dan lembaga pendanaan di Eropa yang melakukan investasi secara langsung maupun tidak langsung untuk industri sawit.

ABN-AMRO

- ABN-AMRO mengatakan ada ratusan industri sawit yang beroperasi secara global, namun banknya hanya bekerja sama dengan tujuh perusahaan yang dinilai memenuhi standar kriteria keberlanjutan bank.
- ABN-AMRO tidak percaya boikot atau penarikan kembali investasi, dan lebih memilih menggunakan pengaruh dari perspektif finansial untuk mendukung industri sawit berkelanjutan, menanggapi desakan-desakan untuk menarik investasi dari perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan praktik perkebunan sawit tidak berkelanjutan.
- ABN-AMRO sudah punya kebijakan terkait pendanaan untuk industri kelapa sawit, salah satunya hanya berinvestasi untuk industri sawit yang memiliki sertifikat RSPO.
- ABN-AMRO telah melakukan penilaian bisnis rutin dan menanyakan langsung pada klien isu-isu yang menjadi perhatian LSM, media massa, dan masyarakat selain mencari tahu dari pihak ketiga secara independen guna memudahkan pengambilan keputusan untuk remediasi kasus.

Rabobank

- Keharusan klien memiliki sertifikat RSPO sebagai syarat untuk memperoleh pendanaan untuk industri dan perkebunan kelapa sawit juga diterapkan oleh Rabobank
- Rabobank berusaha selektif dalam berbisnis kelapa sawit sehingga hanya bekerja sama secara langsung dengan 20 perusahaan.
- Jika ada persoalan dengan salah satu klien, bank tersebut akan langsung memasukkannya ke radar pemantauan, dan memberikan tekanan secara langsung.
- Namun, berbeda dengan ABN-AMRO yang masih mau mencari tahu persoalan melalui jalur independen, Rabobank tidak memiliki hubungan langsung dengan perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia maupun menghadapi persoalan lingkungan.

Triodos Bank

- Triodos Bank mengatakan sudah 40 tahun beroperasi dengan tujuan hanya satu, menciptakan investasi, pendanaan atau pinjaman yang memberi dampak positif.
- Triodos Bank termasuk bank pertama di era 1980 yang membiayai pengembangan panel surya, turbin angin, dan pertanian organik.
- Triodos Bank tidak berinvestasi di industri sawit manapun mengingat itu di luar kebijakan bank yang tidak ingin melakukan pendanaan yang menimbulkan dampak buruk.
- Meski percaya uang tidak pernah netral karena kemanapun dibawa secara sadar maupun tidak sadar akan menimbulkan dampak, Triodos Bank sangat meragukan pembiayaan akan berkelanjutan di industri sawit.
- Akan lebih baik lahan dikembalikan ke masyarakat lalu pangan lokal dikembangkan dengan cara berkelanjutan.
- Triodos Bank sulit membayangkan agro-bisnis skala besar untuk memenuhi pasar global dapat berjalan secara berkelanjutan.
- Triodos Bank setiap hari berusaha memastikan apakah pendanaan yang dilakukan sesuai dengan agenda pengendalian perubahan iklim, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan lainnya.

Pandangan Anggota Parlemen Uni Eropa

- Anggota parlemen Uni Eropa dari Belanda Joost Sneller mengatakan parlemen Eropa saat ini mendorong pemerintah Belanda untuk mendukung inisiatif Parlemen Uni Eropa membuat kebijakan pendanaan hijau. Keterlacakan aliran dana nasabah menjadi isu penting yang perlu dijamin oleh pemerintah dan pihak bank.
- Persoalan keterlacakan pendanaan di sektor agribisnis menjadi perhatian, karena terkadang bank atau pendanaan di Eropa berinvestasi di satu industri namun ternyata menggunakan subkontraktor sehingga yang terjadi antara bank dan konsumen di Belanda jadi berjarak begitu jauh.
- Kondisi yang demikian membuat transparansi dan tanggung jawab di seluruh rantai nilai industri dan perkebunan kelapa sawit menjadi penting
- Anggota parlemen Eropa dari Belanda Lammert van Raan mempersoalkan belum adanya regulasi di perbankan maupun perusahaan pendanaan yang berpihak untuk melindungi tidak saja manusia tetapi juga makhluk hidup lainnya dari bisnis yang tidak berkelanjutan, dari krisis iklim yang terjadi.
- Saat ditanya apakah mereka bisa menjadi bagian solusi untuk mendorong industri dan perkebunan sawit berkelanjutan, Lammert van Raan mengatakan sekarang ini tidak. Ini justru menjadi "senjata" dari kerusakan massal, sehingga mbutuh untuk meregulasikannya.

Pandangan Anggota Parlemen Uni Eropa

- Anggota parlemen Eropa dari Partai Hijau Bas Eickhout mengatakan bahwa pembahasan peran investasi bank Eropa sudah dilakukan di parlemen Eropa.
- Ada ide untuk membuat bank iklim yang akan menjadi bank publik pertama yang investasinya khusus untuk pendanaan pengendalian perubahan iklim.
- Tapi parlemen harus yakin dulu kebijakan itu akan konsisten dengan upaya untuk membuat industri dan perkebunan sawit global beroperasi secara berkelanjutan.
- Langkah yang harus dilakukan terlebih dulu adalah membuat definisi finansial hijau itu apa, karena seluruh dunia dengan mudah memberikan label finansial hijau.
- Perlunya meyakinkan seluruh anggota parlemen bahwa saat definisi finansial hijau di Eropa terbentuk maka juga harus ada aturan yang berkaitan dengan standar kriteria berkelanjutan.
- Saat ini yang perlu dilakukan Komisi Uni Eropa yang baru adalah melakukan dengar pendapat dan diskusi soal investasi berkelanjutan hingga transparansi aliran dana ke seluruh rantai nilai industri dan perkebunan sawit.

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

KLHK Menang melawan Pembakar Hutan

- Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) menang melawan pembakar hutan PT Waringin Agro Jaya (WAJ) dengan nilai kemenangan Rp 466 miliar, seiring ditolaknya PK yang diajukan PT WAJ.
- Kasus bermula saat terjadi kebakaran hutan di Sumatera. Kemudian tim KLHK melakukan verifikasi karhutla di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang terjadi Juli hingga Oktober 2015.
- Hasil verifikasi menyatakan telah terjadi kebakaran di areal lahan perkebunan kelapa sawit milik PT WAJ. Lahan yang terbakar seluas 1.626 hektare.
- Ternyata, tidak hanya terjadi pada lahan yang ditanami kelapa sawit namun juga pada lahan semak belukar dengan vegetasi dominam pohon gelam.
- Tim verifikasi juga menyatakan bahwa areal perkebunan kelapa sawit tergugat adalah lahan gambut.
- Pakar kehutanan IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan kebakaran lahan tidak menimbulkan kerugian sama sekali bagi PT WAJ, bahkan menimbulkan keuntungan bagi PT WAJ. Hal tersebut terjadi karena PT WAJ dinilai tidak perlu lagi membeli kapur yang digunakan untuk meningkatkan Ph gambut dan tidak perlu membeli pupuk dan pemupukan karena sudah digantikan dengan adanya abu dan arang bekas kebakaran. Perusahaan dinilai mengambil keuntungan karena tidak mengeluarkan biaya yang harusnya digunakan apabila melakukan pembukaan lahan tanpa bakar.

10 Perusahaan Dominasi Kebakaran Hutan di Sumsel

- Sebanyak 10 perusahaan di Sumatra Selatan tercatat mendominasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dari total 31 perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau IUPHHK di provinsi itu pada tahun ini.
- Hutan Kita Institute (HaKI) melansir data berdasarkan pemetaan. HaKI menghitung luasan karhutla dari 31 perusahaan IUPHHK mencapai 57.580 ha di mana lebih dari 54.000 ha berada di konsesi 10 perusahaan, salah satunya grup APP Sinar Mas, yang pada 2015 lalu turut terbakar.
- HaKI menghitung sebaran karhutla tersebut dengan menggunakan sejumlah data resmi, salah satunya peta IUPHHK 2016 yang diterbitkan pemerintah dan citra sentinel periode 18 Oktober 2019 untuk melihat kebakarannya
- Rata-rata hutan yang dikelola para perusahaan tersebut ditanami komoditas untuk bahan baku industri, seperti kayu akasia.
- Kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi cenderung terjadi karena faktor jenis tanah, terutama gambut, serta kesiapan perusahaan dalam menghadapi karhutla saat kemarau tiba.
- Karhutla yang terjadi di wilayah konsesi merupakan tanggung jawab mutlak dari pemegang izin tersebut.

10 Perusahaan Dominasi Kebakaran Hutan di Sumsel

10 perusahaan sektor kehutanan dengan kebakaran terluas pada tahun ini:

1. PT Bumi Mekar Hijau (BMH) yang merupakan grup APP Sinar Mas dengan luasan karhutla sekitar 22.311,2 hektare,
2. PT Musi Hutan Persada milik Marubeni Corporation seluas 10.175 ha
3. SBA Wood Industries milik APP Sinar Mas seluas 3.876 ha
4. PT Tiesico Cahaya Pertiwi seluas 3.815 ha.
5. PT Rimba Hutani Mas bagian dari APP Sinar Mas seluas 3.540 ha
6. PT Paramitra Mulia Langgeng seluas 3.409 ha
7. PT Hutan Bumi Lestari (HBL) yang hampir seluruh area konsesinya terbakar seluas 2.084 ha,.
8. PT Bumi Andalas Permai (BAP) milik APP Sinar Mas dengan luasan 1.718 ha
9. PT Bumi Persada Permai milik APP Sinar Mas dengan luasan 1.546 ha.
10. PT Buana Sriwijaya dengan luasan terbakar 1.036 ha.

Status Tanggap Darurat Kebakaran Hutan di Sumsel Diperpanjang

- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali memperpanjang status tanggap darurat hingga tanggal 30 November 2019.
- Gubernur Sumatera Selatan mengatakan kondisi kebakaran yang masih menjalar di beberapa daerah membuat pemerintah memutuskan untuk memperpanjang status tanggap darurat hingga 30 November 2019 dari yang semula berakhir pada 10 November 2019.
- Perpanjangan status tersebut sudah dilakukan untuk kedua kalinya setelah berakhir pada Oktober lalu.
- Prediksi dari BMKG, musim kemarau masih akan berlangsung hingga minggu ketiga November. Adapun puncak musim hujan di Sumsel diperkirakan terjadi pada periode Februari-Maret.
- Mengacu pada kondisi itu, perpanjangan status tanggap darurat akan dapat tetap menyiagakan pasukan di lokasi yang dianggap rawan terbakar.

Karhutla di Sumsel Meluas Mencapai 361 Ribu Hektare

- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Sumatra Selatan telah menghanguskan 361.857 hektare.
- Meski dalam sepekan ke belakang hujan sudah mulai mengguyur, namun titik api pada 8 November 2019 kembali meningkat.
- Pantauan titik api yang terjadi sejak 7 November 219 sebanyak 140 titik dengan tingkat kepercayaan di atas 80 persen, 234 titik dengan tingkat kepercayaan 30-80 persen, sementara 20 lainnya di bawah 30 persen
- Daerah yang terbesar luasan lahan terbakarinya yakni Ogan Komering Ilir (OKI) dengan 204.974 hektare, disusul Banyuasin 59.425 hektare dan 43.815 hektare di Musi Banyuasin.
- Dari total luasan lahan 361.857 hektare yang sudah terbakar, 220.483 hektare di antaranya berada di kawasan gambut, sementara 131.374 lainnya berada di kawasan nongambut. Sementara berdasarkan kawasan, 176.148 hektare berada di kawasan hutan dan 185.741 hektare lainnya di kawasan nonhutan.

Sumber Berita

- <https://www.arah.com/article/50881/bpdlh-diharapkan-dapat-kurangi-dampak-perubahan-iklim.html>
- <https://www.wartaekonomi.co.id/read255806/maria-zakharova-sesalkan-mundurinya-as-dari-kesepakatan-paris.html>
- <https://www.antaranews.com/berita/1145660/strategi-lembaga-pendanaan-eropa-mendukung-sawit-berkelanjutan>
- <https://www.mongabay.co.id/2019/11/03/mendulang-karbon-di-negeri-sejuta-kolong/>
- <https://news.detik.com/berita/d-4773916/jokowi-menang-lawan-pembakar-hutan-pt-waringin-rp-466-miliar>
- <https://sumatra.bisnis.com/read/20191106/533/1167588/ini-10-perusahaan-dominasi-kebakaran-hutan-di-sumsel>
- <https://nasional.republika.co.id/berita/q0h1ln368/klhkfao-jajaki-kerja-sama-pengendalian-perubahan-iklim>
- <https://banten.antaranews.com/berita/70644/kementerian-lhk-fao-jajaki-kerja-sama-baru-perkuat-pengendalian-perubahan-iklim>
- <https://kumparan.com/balleonews/bappenas-lakukan-akselarasi-pembangunan-rendah-karbon-di-papua-barat-1sBiml8Sue3>
- <https://internasional.republika.co.id/berita/q0h195382/langkah-as-keluar-dari-perjanjian-iklim-dikritik>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191108130239-20-446627/karhutla-di-sumsel-meluas-mencapai-361-ribu-hektare>
- <https://kumparan.com/urbanid/status-tanggap-darurat-kebakaran-hutan-di-sumsel-diperpanjang-1sDLr16dZrN>



LULUK'S UPDATE

**MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN
BERSAMA LULUK ULIAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI**

Madani